

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Literature Review.**

*e-government* yang dikembangkan oleh pemerintah Korea telah dinilai sebagai yang terbaik di dunia oleh PBB dan efektifitas *e-government* Korea juga diakui secara luas oleh komunitas internasional.

Pada awalnya, *e-government* Korea Selatan memiliki tujuan untuk tahap awal yaitu mendigitalisasi semua prosedur penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan infrastruktur IT. Untuk mewujudkannya pemerintah Korea Selatan memulai dengan membangun dasar komputerisasi sistem administrasinya pada 1970, mengkomputerisasi semua database utama nasional pada 1980, dan membangun jaringan informasi dan komunikasi berkecepatan tinggi pada tahun 1990-an.

Pada tahun 2000, Korea Selatan mulai mengidentifikasi *e-government* sebagai kunci dari strategi untuk berinovasi dan mengadopsinya sebagai agenda kepresidenan. Pada tahun 2001, "*Electronic Government Act*" diaktifkan sebagai undang-undang di Korea Selatan dan di implementasikan untuk meningkatkan efisiensi semua urusan administrasi pemerintahan dan secara dramatis meningkatkan kualitas semua layanan publik.

Pada periode kedua (2003-2007), pemerintah Korea Selatan memperluas dan memperbaiki semua pelayanan kepada masyarakat dan dunia

bisnis dengan mendigitalisasi seluruh proses bisnis pemerintah. Digitalisasi juga memperbaiki efisiensi administrasi dan transparansi melalui reformasi metode-metode kerja pemerintah.

Pada periode selanjutnya (2008-2012), pemerintah Korea Selatan mulai membangun target berikutnya, yaitu mengintegrasikan semua sistem *e-government* agar pelayanan publik terwujud. Dimulai pada tahun 2008, pemerintah menjalankan implementasi berbagai proyek yang berfokus pada koneksi dan integrasi yang mendukung penciptaan sistem informasi yang baik untuk mengintegrasikan layanan publik berorientasi masyarakat dan bisnis.

Berikut adalah *best practice* dari *e-government* Korea Selatan :

1. Government Integrated Data Center - GIDC : <http://www.ncia.go.kr>.

Merupakan *data center* yang dioperasikan secara individual oleh setiap kementerian Korea Selatan dan telah terintegrasi dan diatur oleh grup profesional sejak 2005.

2. Electronic Customs Clearance System - UNI-PASS :  
<http://portal.customs.go.kr>.

Mengatur mengenai pajak dari kegiatan ekspor dan impor yang berkaitan dengan bisnis

3. Online Patent System - KIPOnet : <http://www.patent.go.kr>.

Semua prosedur mengenai hak patet seperti pengajuan patet secara online dan mengecek progres dari pengajuan diatur secara digital

4. Digital Budget & Accounting System - dBrain :  
<http://www.digitalbrain.go.kr>.

Semua aktivitas finansial dari pemerintahan Korea Selatan di atur secara *real time* dari pendapatan, budget, dan realisasi, aset, dana, dan lain-lain

5. National Disaster Management System – NDMS.

NDMS mendukung mengenai manajemen dari bencana alam dari berbagai jenis bencana yang memiliki 119 prosedur penyelamatan

6. Immigration Control System.

Seluruh informasi mengenai penumpang imigrasi akan di analisa dan prosedur imigrasi di tangani secara digital

7. Korea Online e-Procurement System - KONEPS : <http://www.g2b.go.kr>.

Semua prosedur *procurement* pemerintahan Korea Selatan ditangani secara online melalui satu jendela

8. Comprehensive Tax System - Hometax : <http://www.hometax.go.kr>.

Pembayaran pajak dapat dilakukan secara online di rumah maupun kantor tanpa perlu datang ke kantor pajak

9. Postal Logistics Information System - PostNet : <http://www.epost.go.kr>.

Semua proses penerimaan, distribusi, dan pengiriman surat terintegrasi dan di tangani secara digital

10. SOS Public Relief Service.

Seluruh lapisan masyarakat dapat melaporkan atau meminta pertolongan darurat kepada polisi tanpa perlu berkata-kata, cukup menggunakan *mobile phone* atau perangkat sejenis. Dengan demikian, polisi dapat mengetahui posisi dari pelapor.

11. *e-government* Standard Framework - eGovFrame Portal :

<http://www.egovframe.go.kr>.

Sistem informasi dari *e-government* dan modul-modulnya yang digunakan di berbagai jenis sistem di simpan dan dikembangkan secara bersama oleh seluruh lapisan pemerintahan

12. Civil Service Portal - Minwon24 : <http://www.minwon.go.kr>.

Masyarakat bisa mengajukan untuk dokumen ataupun sertifikat sipil dimana saja dan dimana saja melalui internet

13. Information Network Villages - Invil : <http://www.invil.org>.

Merupakan projek untuk kawasan pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas kehidupan di pedesaan dengan memperkenalkan *e-commerce*

14. e-Participation Portal - ePeople : <http://www.epeople.go.kr>.

Memfasilitasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dengan memberikan ruang untuk mengajukan protes, kritik, ataupun saran melalui satu jendela

15. Business Process System-On-nara BPS.

Menyimpan dan menangani administrasi bisnis pemerintahan secara online, serta memproses laporan.

16. One-stop Business Support Service - G4B : <http://www.g4b.go.kr>.

Memberikan informasi mengenai bisnis dan industri

17. Employment Portal - WORKNET : <http://www.work.go.kr>.

Mengintegrasikan dan mengkomunikasikan berbagai macam informasi karyawan dari berbagai jenis organisasi dan mendukung pencarian pekerjaan dengan mengkomunikasikan bisnis dan pencari pekerjaan

18. Intelligent Transportation System – ITS.

Memfasilitasi dan mengoptimasi serta mengautomatisasi kegiatan operasional lalu lintas

19. Shared Use of Administrative Information - e-hanarominwon :

<http://www.pisc.go.kr>.

Pekerja sipil bisa memproses permintaan yang datang kepada sipil dengan mengecek informasi secara online

20. Resident Registration Data System.

Ditangani oleh pemerintahan lokal yang dapat membantu untuk memahami hubungan di antara masyarakat dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. (Arianto Wardani, 2014 : 16-19)

Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan TIK dengan istilah E-government. Penerapan E-government merupakan amanat Inpres No.3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tatakelola pemerintah dan pelayanan publik membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dapat dieliminir melalui pemanfaatan e-government menjadi lebih fleksibel, dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. Selain itu e-government

menawarkan pelayanan publik secara 24 jam. Sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sebagai sebuah badan atau lembaga publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membuat kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bertujuan untuk menerapkan e-government. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara elektronik dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai implementasi e-government di Kominfo. E-government ini, adalah program yang dijalankan oleh dinas Kominfo untuk melakukan penyebaran informasi, pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat, bisa terjadinya peningkatan antara hubungan pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis, dan pelaksanaan pemerintah lebih efisien, sebuah program yang bagus untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, terlebih lagi bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dari pihak pemerintah. Namun program yang direncanakan dari tahun 2012 ini, belum berjalan dengan baik. Masih adanya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program e-government ini, permasalahan terletak pada implementasi atau penerapannya e-government ini pada masyarakat, yang belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Dan tidak adanya lagi tempat untuk mengakses internet atau wifi dari pemerintah untuk masyarakat luas. Oleh sebab itu Kominfo bisa membuka kembali lokasi berbasis internet atau wifi untuk membantu masyarakat dalam mencari informasi yang harus diakses melalui internet (Pasaribu Humisar Parsaorantua, 2017).

Perkembangan teknologi, informasi dan komputer telah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memanfaatkan teknologi komputer dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan e-Government. Pelayanan yang baik berhubungan dengan kinerja aparatur, sehingga aparatur menjadi unsur penentu keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatori survey. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, kuesioner, interview dan studi pustaka. Sedangkan ukuran sampel ditentukan berdasarkan probabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-Government memberikan pengaruh sebesar 54,85% terhadap kinerja aparatur pemerintah Indonesia, sedangkan sisanya sebesar 45,15% merupakan pengaruh faktor-faktor lain. Hal tersebut memberikan bukti empiris bahwa semakin baik implementasi kebijakan e-Government maka semakin meningkat kinerja aparatur pemerintah Indonesia. Komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, serta struktur birokrasi telah memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan kebijakan. Hal yang paling dominan dalam implementasi kebijakan ini adalah konsistensi sikap implementor sejak perencanaan sampai dengan pengawasan mulai tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan (Dewi Kurniasih, Tatik Fidowaty, Poni Sukaesih, 2013).

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian, Peneliti dan Tahun Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Arianto Wardani, <i>PERANAN SISTEM E- BUDGETING DALAM MEMBERIKAN</i>	1. Obyek/tempat penelitian 2. E-Budgeting	Membahas tentang pelayanan e-government

	<i>TRANSPARANSI, 2014</i>		
2	Pasaribu Humisar Parsaorantua, <i>IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (STUDI TENTANG WEB E- GOVERNMENT DI KOMINFO KOTA MANADO)</i>	1. Lokasi penelitiannya di Manado 2. Tesis	Membahas tentang e-government
3	Dewi Kurniasih, Tatik Fidowaty, Poni Sukaesih, <i>PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E- GOVERNMENT TERHADAP KINERJA APARATUR KOTA CIMAHI, Jurnal Vol 15, No 1 (2013)</i>	1. Lokasi penelitiannya di Kota Cimahi 2. Jurnal	Membahas tentang e-government

## B. Kerangka Teoritis.

Fenomena yang ada yang terjadi dalam hubungan internasional dalam hal ini adalah masalah perkembangan e-Government, karena dalam melaksanakan serta meningkatkan kehidupan suatu bangsanya, suatu negara dituntut untuk mengadakan suatu interaksi dengan negara lainnya dalam bidang apapun.

### 1. Kerjasama Internasional.

Pelaku dari hubungan antar negara atau hubungan internasional tersebut dapat terjadi melalui hubungan-hubungan, dimana setiap negara pada dasarnya adalah peserta dalam hubungan internasional, tetapi dengan intensitas keterlibatan dan aktifitas yang berbeda yang ruang lingkungnya meliputi segala bentuk interaksi negara dengan berbagai aspek internasional, selanjutnya istilah Hubungan Internasional didefinisikan, sebagai :



**“Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, sejarah baru dalam politik internasional dan merupakan semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti : semua tingkah laku yang terjadi adalah berasal dari negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain” (Trygve Mathiesen, 2007 : 1).**

Dengan adanya Hubungan Internasional, maka melahirkan suatu kerjasama internasional yang diperincikan secara terperinci, antara lain:

**“Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang, pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk yang memuaskan bagi semua pihak”. (K.J.Holsti, 2007 : 650)**

Setiap kegiatan pembangunan nasional memerlukan sejumlah biaya yang cukup besar dan biasanya keseluruhan dapat tersedia didalam negeri, maka dalam hal ini bantuan luar negeri merupakan faktor yang sangat penting artinya dalam tujuan untuk melaksanakan berbagai pembangunan didalam negeri.

Hubungan antar Indonesia dan Korea Selatan merupakan salah satu contoh bagaimana interaksi kerjasama bilateral dilaksanakan sebagai wujud dari kerjasama antar negara dalam hubungan dengan faktor ekonomi, meskipun demikian hubungan itu memerlukan watak tentu yaitu hubungan yang tidak eksploitor, karenanya persoalan yang timbul adalah bagaimana mengubah interdependensi ekonomi yang eksploitor menjadi pola hubungan yang bersifat distributif dan seimbang.

Sebagai telah kita ketahui bersama bahwa suatu negara adalah merupakan hal yang mustahil untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sendiri tanpa memerlukan suatu bentuk kerjasama dengan negara lain. Timbulnya kerjasama internasional disebabkan adanya interdependensi antar negara. Adapaun batasan yang diberikan, sebagai berikut :

**“Kerjasama Internasional dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan, akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional”.** (Koesnadi Kartasasmita, 2008 : 120)

Sebagian besar interaksi dan transaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian berbagai negara.

Mengingat semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam setiap negara, maka kerjasama antar negara ini dapat mencakup semua bidang seperti : ekonomi, sosial, budaya dan teknik. Kerjasama internasional dibidang ekonomi dengan sendirinya suatu negara dapat memasarkan hasil produksi dan menghasilkan barang-barang yang tidak tersedia untuk memenuhi kelangsungan produksi dari negara lain, sehingga akhirnya menimbulkan transaksi jual beli antar negara.

Indonesia seperti bangsa negara lain, terutama dalam proses pembangunan ekonominya masih memiliki ketergantungan, maka

sendirinya Indonesia mengadakan hubungan kerjasama ekonomi dengan negara lain, sebagai berikut :

**“Kerjasama dalam pembangunan ekonomi sekarang ini merupakan tujuan ekonomi setiap negara, karena setiap negara memiliki keterbatasan sumber, kemampuan administrasi dan keterampilan tekniknya”.** (Teuku May Rudi, 2003 : 119)

Demikian pula, bahwa pada dasarnya suatu negara akan melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Untuk lebih jelasnya, adalah sebagai berikut : **“Pada jaman sekarang ini hampir tidak ada negara didunia ini yang tidak mempunyai hubungan ekonomi di luar negeri”.** (Ace Partadireja, 2015 : 114)

Seperti halnya hubungan kerjasama ekonomi antar Indonesia dan Korea Selatan yang terjalin dan telah berlangsung sejak lama. Kerjasama ini pada dasarnya apabila dilihat dari secara sepintas nampaknya telah banyak membuahkan hasil, bagi Inonesia maupun Korea Selatan sendiri. Dimana kendala yang dihadapi oleh Indonesia antara lain keterbatasan dana (modal), teknologi, tenaga ahli, dan tentunya sederetan kendalanya yang merupakan ciri khas dari setiap negara yang sedang berkembang.

Berdasarkan asumsi dasar tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa hubungan kerjasama antar ekonomi Indonesia dan Korea Selatan adalah merupakan suatu kerjasama yang didasari oleh sikap yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Pola interaksi ini

kiranya yang dapat menimbulkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara negara Indonesia dan Korea Selatan.

## **2. Teknologi Informasi (*Information Technology*).**

Corak teknologi yang ada pada saat ini telah mempengaruhi corak nilai-nilai kehidupan sebelumnya dan telah menjadi pegangan hidup sejak dulu. Pada waktu sekarang ini telah banyak terjadi perubahan-perubahan dalam perkembangan teknologi.

Teknologi yang diciptakan demi kemajuan dan efisiensi juga mempunyai sifat khas mengexploitas penduduk maupun sumber dayanya, yang pada akhirnya akan mempunyai sifat pola pikiran yang berbeda dan lebih mengutamakan segi kualitatif bukan dari segi kuantitatif. Aspek ketiga dari teknologi adalah elitisme, struktur teknologi menentukan bahwa jenis teknologi hanya akan ditangani oleh suatu kelompok tertentu.

Menciptakan teknologi yang canggih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap negara yang ingin menciptakan peralatan teknologi tinggi harus memiliki biaya yang banyak dan memiliki perekonomian yang kuat. Oleh karena itu negara-negara kecil dan negara berkembang berusaha untuk mewujudkannya dengan mencari bantuan luar negeri.

Negara yang menjual dan yang memberi pinjaman juga mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit, dengan menjual hasil teknologinya maka negara tersebut dapat memperoleh pemasukan

keungan negara (devisa). Negara yang memberikan pinjaman akan memperoleh hasil bunga pinjaman dari negara yang minta bantuannya tadi. Hal tersebut dilakukan oleh suatu negara sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi bangsanya.

Hubungan antara negara dalam beberpa hal yang mengacu kepada ekonomi internasional yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antara suatu negara lainnya (Boediono, 2001 : 1).

Maka dapat dikatakan ekonomi internasional merupakan bagian dari hubungan internasional. Ekonomi internasional lebih kecil ruang lingkupnya dibandingkan dengan hubungan internasional, karena hubungan internasional mempelajari seluruh bentuk hubungan yang melintas batas-batas suatu negara sedangkan ekonomi internasional hanya mempelajari hubungan ekonomi yang melintas atau terjadi antar negara.

Adapun yang dipelajari dalam ekonomi internasional meliputi perdagangan, bantuan luar negeri dan penanaman modal asing (investasi). Bila dilihat kembali definisi ekonomi internasional yang dikemukakan oleh Boediono, dimana ekonomi internasional ditekankan pada hubungan ekonominya, Boediono mengatakan bahwa hubungan ekonomi antar negara mempunyai tiga bentuk hubungan, yaitu:

1. Hubungan ekonomi bisa berupa pertukaran hasil output negara yang satu dengan negara yang lain.
2. Hubungan ekonomi bisa berbentuk pertukaran atau aliran produksi atau faktor produksi.
3. Hubungan ekonomi antar negara bisa dilihat dari segi konsekuensinya terhadap posisi utang piutang suatu negara terhadap negara lain (Boediono, 2001 : 3).

Sebab-sebab munculnya hubungan ekonomi antar negara adalah:

1. Perbedaan tingkat kerajangan (*scarcity*), apabila suatu negara tingkat *scarcity*-nya lebih rendah maka negara ini akan mengalirkan barang-barang kenegaralain dimana *scarcity*-nya lebih tinggi.
2. Perbedaan faktor produksi, perbedaan faktor produksi antara negara yang satu dengan negara lain akan menyebabkan negara-negara itu terjadi daerah yang surplus dan daerah minus.
3. Perbedaan komperatif dari harga barang, selama ada perbedaan komperatif daripada harga-harga barang selama itu pula akan timbul ekonomi yang mengalir antara Negara (Boediono, 2001 : 4).

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi internasional yang berkenan dengan fungsi produksi dan aktivitas dari adanya pertukaran barang dan jasa yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknologi baik itu dalam bentuk perdagangan maupun pinjaman luar negeri.

### 3. Konsep E-Government di Indonesia.

*Cyberspace* adalah tempat kita berada ketika mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama Internet. Secara fisik, Internet tak lain adalah sekumpulan komputer, tersebar di seluruh dunia, yang dihubungkan satu sama lain melalui jaringan telekomunikasi satelit global dan kabel telepon lokal. Istilah *Cyberspace* itu sendiri diciptakan oleh seorang penulis fiksi ilmiah, William Gibson, yang membayangkan adanya dunia maya atau virtual di dalam jaringan komputer yang mensimulasikan dunia nyata kita sehari-hari. Memenag sulit dibayangkan bila belum dialami. Namun, sebuah uraian singkat berikut mungkin bisa memperjelas.

Di antara dua orang yang bercakap-cakap tentunya ada ruang. Ketika bercakap-cakap secara lisan, ruang itu tak lain adalah ruang fisik yang tiga dimensi itu. Jika bercakap-cakap lewat telepon, tentunya ada sejenis ruang juga yang mengentarai kita. Ruang itulah yang disebut sebagai *cyberspace* (Willian Gibson, 2004). Kiasan atau metafora ruang ini memang menjadi lebih relevan ketika terjadi komunikasi di antara lebih dari dua orang dan masing-masing berada di tempat-tempat yang tersebar di penjuru bumi sebab ruang itu kini tidak hanya mengentarai, tetapi justru melingkungi para komunikator dalam jaringan komputer. Dan ketika yang berkomunikasi bukan hanya dua atau banyak manusia, melainkan juga mesin-mesin informasi alias kompter, kiasan ruang itu semakin relevan.

Lebih jauh multi media Indonesia, memberikan gambaran mengenai e-goverenment Indonesia yang dilihanya masih memiliki sisi minus dari

kemampuan sumber daya manusianya, secara rincinya dapat diuraikan sebagai berikut :

**“E-Goverenment di Indonesia merupakan sebuah kecenderungan global yang harus diadopsi oleh kalangan pemerintahan di Indonesia, baik pusat maupun daerah. Akan tetapi daya dukungan sumber daya manusia yang menjadi *operated* dalam menggunakan sarana tersebut sangatlah minus. Ada baiknya pemerintah menyadari hal tersebut dengan secepat mungkin memberikan penyuluhan maupun pendidikan dan latihan guna lebih memantapkan lah fungsi dan faedah e-goverenment di Indonesia”.** (Roy Suryo, 2005 : 2)

Pemerintah Indonesia melihat e-Goverment sebagai sebuah fenomena sebagai berikut:

**“E-Government adalah cara pemerintah menggunakan teknologi terbaru untuk mempengaruhi orang-orang dengan akses yang sangat bagus dan nyaman untuk informasi dan pelayanan pemerintah, untuk membuktikan pelayanannya dan bisa membuka kesempatan bagus untuk berpartisipasi di dalam institusi dan proses demokrasi”** (Roy Suryo, 2005 : 4)

Sementara itu di Indonesia pada tanggal 9 Juni 2003 telah diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan E-Goverment. Instruksi Presiden tersebut ditunjukkan kepada Menteri, kepada LPND, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Panglima TNI, KAPOLRI, Jaksa Agung, Gubernur, dan Bupati/Walikota, untuk :

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Goverment secara nasional dengan berpedoman pada kebijakan dan



Strategi Nasional Pengembangan e-Government sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

2. Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.
3. Melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua yang dikoordinasikan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi.
4. Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden (Kemeninfo, 2019).

Secara lebih sederhana, e-Government merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakatnya kapan dan dimanapun mereka bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan yang pemerintah berikan kepadanya. Hal ini merupakan salah satu bentuk fungsi pemerintah untuk memberikan alternative channel pilihan melalui teknologi informasi (media internet) ini.

Dengan tingkat pertumbuhan pengguna internet yang menunjukkan angka sangat fantastik, bahkan internet telah menjadi bagian kebutuhan dalam sebuah rumah tangga, fenomena ini menunjukkan bahwa 5 sampai 10 tahun yang akan datang teknologi informasi akan menguasai sebagian besar pola kehidupan masyarakat, sehingga model e-Government harus

dipersiapkan dan dikembangkan dengan baik dan sedini mungkin (Kemeninfo, 2019).

#### 4. E-Government Korea Selatan.

Seperti halnya Hubungan Internasional, yang menyangkut interaksi negara dengan berbagai aspeknya, dimana didalam interaksinya terdapat berbagai persoalan pengaruh dari tingkah laku suatu negara yang dapat mempengaruhi yang lainnya, maka untuk menghadapi persoalan pengaruh dari luar yang digariskan untuk menjelaskan sasaran yang ingin dicapai dicanangkanlah Politik Luar Negeri. Selain Politik Luar Negeri pada hakekatnya merupakan tindakan yang ditunjukkan ke luar negeri dalam menghadapi persaingan global antar negara. Politik Luar Negeri didefinisikan, sebagai berikut :

**“Politik Luar Negeri adalah sekumpulan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksud untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang ditetapkan khususnya tujuan-tujuan untuk suatu kurun waktu”.** (Supena Prawirasaputra, 2004 : 7)

Komunikasi internasional berfungsi untuk mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih. Komunikasi internasional membantu usaha-usaha untuk mencapai tujuan hubungan internasional dan meningkatkan hasil yang didapat dari hubungan internasional dan meningkatkan hasil yang didapat dari hubungan tersebut. Dalam hal ini komunikasi internasional didefinisikan, sebagai berikut :

**“Komunikasi internasional adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan**

**dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikannya yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas. Komunikasi internasional berfungsi mendinamisasikan hubungan internasional yang dijalin antara dua negara atau lebih”.**  
(Dedi Jamaludin Malik, 2003 : 12)

Kemajuan di bidang teknologi informasi telah mengubah cara pandang masyarakat dunia terhadap dunia itu sendiri. Sejalan dengan pendapat tersebut, adalah :

**“Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat membuat bola dunia terasa makin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi. Cara pandang terhadap duniapun sudah berubah. Teknologi informasi dalam perubahan cara pandang itu telah menjadi ujung tombak berbagai perubahan lain yang dirasakan manusia di muka bumi ini”.** (Yanuar Nugroho, 2018)

Di negara-negara maju, hasil dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya teknologi digital (*Electronic Digital Services*) telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru, yang mereka istilahkan sebagai *Electronic Government (e-Government)*. Berbagai definisi yang ada mengenai e-Government (tergantung dari negara yang bersangkutan) memperlihatkan sebuah keinginan yang sama, yaitu bertransformasi bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampaui birokrasi, menjadi mekanisme hubungan interaksi yang lebih jauh lebih bersahabat.

Memperhatikan akan pentingnya komunikasi bagi memasyarakatkan suatu tujuan politis maupun ekonomis, Korea Selatan sebagai negara maju sangat konsisten membantu Indonesia dalam pengembangan teknologi informasi, berkenaan dengan informasi Korea Selatan pula menjadi negara

yang kuat dan maju secara ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang sangat memerlukan adanya bantuan luar negeri dalam memperbaiki infrastruktur dalam membangun pelayanan komunikasi yang terpadu guna mengantisipasi dari berbagai kemungkinan yang dapat berakibat pada instabilitas politik dalam negeri. Sejalan dengan pandangan tersebut, penulis uraikan mengenai bantuan Korea Selatan sebagai berikut :

**“... Korea Selatan membantu Indonesia dalam penyediaan teknologi informasi yang berupa infrastruktur bagi pengembangan e-goverment di Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dan akses data yang penting bagi pengembangan sosial masyarakat di Indonesia, sekaligus membawa dampak positif bagi kepentingan ekonomi dan politik menjelang PEMILU Legislatif maupun Eksekutif”.** (*Kompas*, 2014)

Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing komunitas.

Pengertian dan penerapan e-Government di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan.

Gambaran mengenai pelaksanaan e-Government di Korea Selatan secara ringkas, padat, dan jelas, yaitu : **“E-Government memilih untuk mengirimkan informasi pemerintah dan hubungan langsung melalui internet atau melalui hal-hal digital lainnya”.** (Richardus Eko Indrajit, 2003 : 3)

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis dapat menarik asumsi, sebagai berikut :

1. Kerjasama Indonesia – Korea Selatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam bidang pengembangan e-Government di Indonesia akan berdampak pada meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur komunikasi dan informasi bagi terselenggaranya proses pelayanan publik secara efektif dan efisien.
2. Implementasi e-Government dapat berdampak pada meningkatnya kualitas dan kuantitas dengan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan, menyelenggarakan, menguasai, dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, bagi kepentingan negara Indonesia (Kemeninfo, 2019).

### **C. Hipotesis.**

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang akan penulis ajukan sebagai berikut : **“Kerjasama Indonesia melalui Kemenpan/RB dengan Korea Selatan di bidang teknologi informasi diarahkan pada peningkatan pelayanan dari pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat Indonesia, maka peningkatan pelayanan IT di kementerian dapat membantu mempermudah dan mempercepat pelayanan online di bidang pemerintahan”**.

Definisi operasional yang penulis kemukakan adalah :

1. Kerjasama Indonesia – Korea Selatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi dalam kaitannya dengan perkembangan e-Government di Indonesia, di segala bidang kehidupan masyarakat, khususnya industri, pemerintah, pendidikan, dan perdagangan.

2. Bidang teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari radio, telegram dan telepon, televisi, satelit telekomunikasi, hingga internet.
3. E-Government adalah upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah yang berbasis teknologi internet dengan system online dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

#### D. Operasionalisasi Variabel Penelitian.

Agar dapat menjaga alur dan tidak menyimpang dari tujuan semula, penulis mengajukan operasionalisasi variabel, sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Analisis Data
<i>Variabel Bebas :</i> Kerjasama Indonesia melalui Kemenpan/RB dengan Korea Selatan di bidang teknologi informasi diarahkan pada peningkatan pelayanan dari pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat Indonesia	a. Kerjasama Indonesia - Korea Selatan di bidang teknologi informasi  b. Pelayanan data, informasi maupun perijinan	Kerjasama yang sudah terbangun antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan pemerintah Korea Selatan harus terus diperkuat. Tidak hanya dalam penerapan electronic government (e-Gov) melainkan dalam sektor lain berkenaan dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB. (Kemenpan.rb, Maret 2019)  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. (Kemenko Perekonomian, 2018)

<p><i>Variabel terikat :</i> maka peningkatan pelayanan IT di kementerian dapat membantu mempermudah dan mempercepat pelayanan online di bidang pemerintahan</p>	<p>a. Masyarakat dapat dilayani secara mudah dan cepat</p> <p>b. Pelayanan online di bidang pemerintahan</p>	<p>Optimalisasi E-government dalam pelayanan publik untuk implementasi standar pelayanan. (Krisyanidayati, 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengantisipasi kendala dalam layanan e-KTP petugas sudah diberi bimbingan dan pelatihan bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sekaligus bagaimana cara mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat. (Mia Dyah Yuniati, 2013)</li> <li>• E-Budgeting merupakan sebuah aplikasi sistem keuangan yang disimpan secara Online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. (Arianto Wardani, 2014)</li> <li>• Sistem elektronik juga diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pegawai pajak dalam melakukan pelaksanaan perpajakan. (Nita Rysaka, et. al, 2018)</li> <li>• Program Satu Juta Nama Domain merupakan salah satu program unggulan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk meningkatkan konten-konten positif dan produktif di Internet. (Kemeninfo, 2018)</li> </ul>
--	--	--

**E. Skema Teoritik Penelitian.**

Memperhatikan uraian teori di atas, peneliti dapat sampaikan skema teoritik penelitian sebagai berikut :

